

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. : BUKU

Adami Chazawi, (2009), *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, hal. 89.

Admaja Priyanto, (2004), *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, hlm. 15.

Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, hlm. 1.

Andi Hamzah, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. hml. 22.

Alf Ross, (1975), on Guilt, *Responsibility and Punishment*, (London: Stevens & Sons,), h. 17

Barda Nawawi Arif, (1984), *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. hml. 37.

Bdk. Solahuddin, (2010), *KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Visimedia,), hml. 193

Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggunngjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana prenada Media, Jakarta, hml. 4

Eddy O.S.Hiariej, (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hml 122

Fuad Usfa dan Tongat, (2004), *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, hml. 32.

Hiariej, Eddy O.S., (2014) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,,* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,), hml. 112.

Kaimuddin, M. S. S. A., *Analisis Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riadi, (2008), *Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia*”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakart, hml. 100-101.

Kusumadi Pudjosewojo, (1993), *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hml. 36.

- Leden Marpaung**, (2007), *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.
- Lilik Mulyadi**, (2014), *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 64
- M. Arif mansyur dan Elisatris Gultom**, (2005), *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.
- M.Hamdan**, (2005), *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, hal. 8.
- Moeljatno**, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta,), hlm.165
- Osmar Seno Adji**, (1990) *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga,. Hlm. 37.
- Roeslan Saleh**, (1983) *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru,), hlm. 76
- Sudarto**, *Hukum pidana 1 edisi revisi*, j. Argopuro 25 Semarang: Yayasan Sudarto, 2018, hlm 119-120.
- Rachman**, W. E. K., Simatupang, M. S., Kurnia, Y., & Putri, R. (2020). “*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan*”. Rechtidee, 15(1), 133-153.
- R. Soesilo**, (2008) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politea,), hlm. 26.
- Satijpto Rahardjo**, (1998), *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta. hlm. 11
- Siregar, G. T., & TP, S.** (2020). *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*. Bandung, Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji**, (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 13.
- Sutan Remy Syahdeini**, (2009) *kejahanatan dan tindak pidana computer* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 2.
- Wiryono Pradjodikoro**, (1980), *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 1.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009

Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. JURNAL

Basri, M. A. R., Jainah, Z. O., & Satria, I. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* (Studi Putusan Nomor: 705/Pid. Sus/2020/Pn. Tjk). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1), hlm. 225-226.

Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. Jurnal Cita Hukum, 1(1), 95895.

Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). Jurnal Konstitusi, 6(1), hlm. 140.

Hanafi, (1999), *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun hlm.27

Hendri Jayadi Pandiangan, (2017) Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata, Jurnal Hukum To-Ra, Vol 3 No. 2, Agustus

Jabir, J., Thalib, H., & Busthami, D. S. (2021). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. Perkara 1259/Pid. B/2020/PN. Mks.* Journal of Lex Generalis (JLG), 2(3), 1307-1317

Nasution, B. J. (2014). *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*. Yustisia Jurnal Hukum, 3(2). hal 120-121

Roshihan Rosmita, (2018), skripsi *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Mata Uang*" (Unsri) hal. 21-22

Suheri, A. (2018). *Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional*. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 60-68.

Wirajaya, A. N., & Martana, N. A. (2013). *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jurnal Fakultas Hukum Univesitas Udayana. hlm. 3.

Indawati, S., & Dewi, S. (2017). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT. DPS). *VERSTEK*, 5(2).

D. Internet

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo%3A+Pengguna+Internet+net+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker diakses tanggal 16/08/2021 16:09

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik/>, diakses tanggal 1 November 2021, Pukul 10:10 WIB